

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat.

Good governance yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Beranjak dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang (Renja) Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra dan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan jajarannya kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2021.

1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dengan Struktur Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dimana Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

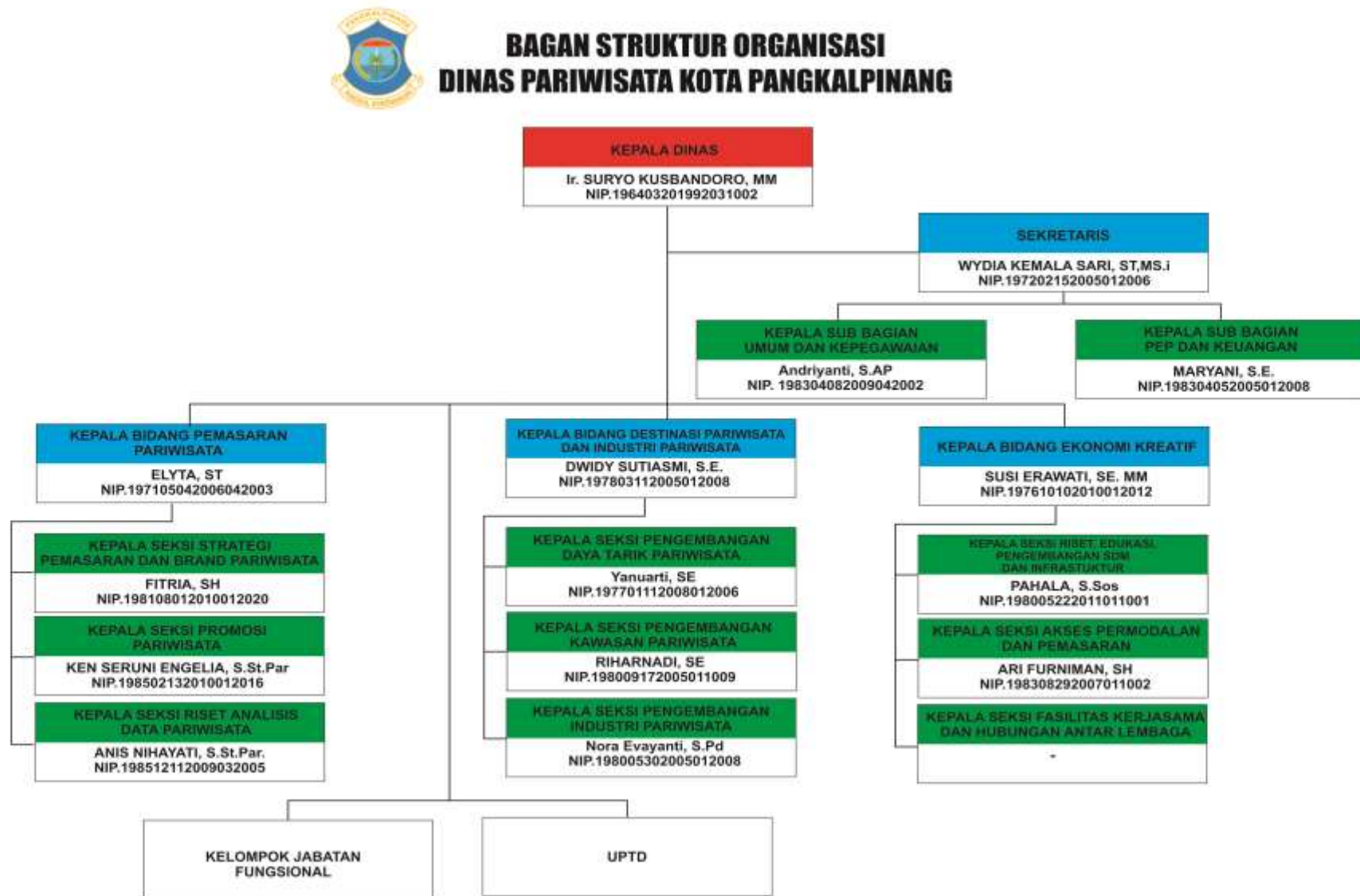
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata;
- f. Pelaksanaan perencanaan Bidang Pariwisata;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pariwisata di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
 - Seksi Promosi Pariwisata
 - Seksi Riset Dan Analisis Data Pariwisata
- d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata
 - Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
 - Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - Seksi Industri Pariwisata
- e. Bidang Ekonomi Kreatif
 - Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur
 - Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran
 - Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



1.2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah 76 orang terdiri atas 32 ASN dan 44 PHL dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan. Untuk jelasnya seperti di bawah ini:

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	2	-	2
III	11	4	5	7	27
IV	2	-	1	-	3
Total					32

b. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	17
	Total	32

c. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S-3	-
2.	S-2	3
3.	S1/DIV	25
4.	D III	4
5.	D I	-
6.	SLTA	-
7.	SLTP	-
8.	SD	-
	Jumlah	32

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya yaitu :

1. Bangunan Kantor

Bangunan kantor terletak di jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang dengan luas 1.540 M².

2. Inventaris/ Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkalpinang.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2021 sebanyak 1 unit Suzuki Ertiga dan 3 unit kendaraan roda 2.

4. Fasilitas/ Perlengkapan Lainnya

Fasilitas dan perlengkapannya lainnya yang dimiliki terdiri dari sarana dan prasarana pada objek-objek wisata baik yang diperoleh dari APBD Kota Pangkalpinang maupun dari APBN.

1.3. Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Rencana Strategis (RENSTRA) 2018– 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOTdilakukan untuk dapat menyusun 4 strategi yaitu:

- a. strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- c. strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; dan
- d. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Berdasarkan analisis SWOT dengan mempertimbangkan isu strategis ditetapkan faktor keberhasilan yaitu kondisi yang harus ada sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap lingkungan organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal :

1. Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang antara lain :

- a. adanya turunan visi dan misi yang jelas;

- b. adanya program yang jelas;
- c. adanya peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah serta peraturan daerah yang mendukung;
- d. adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- e. adanya motivasi, inisiatif, dan kreativitas aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata;
- b. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan Pemerintah Kota;
- c. Budaya kerja yang belum sistematis;
- d. Tata kerja dan tata kelola yang belum tertib;
- e. Masih rendahnya kualitas pelayanan; dan
- f. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi.

Lingkungan Eksternal :

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Infrastruktur menuju daya tarik wisata yang semakin baik;
- b. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
- c. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
- d. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
- e. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- f. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- g. Banyaknya event-event pariwisata.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya (fasilitas dan penunjang pariwisata) yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
- b. Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan *sapta pesona* oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat;
- c. Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- d. Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
- e. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan;

1.4. Isu Strategis

Dalam rangka menuju *good governance*, isu strategis yang berkembang saat ini adalah pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung.

Posisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan suatu pelayanan masih disalah artikan oleh bagian pengelola pelayanan publik, sehingga aparatur cenderung menganggap masyarakat sebagai orang yang harus melayani, bukan yang harus dilayani. Disisi lain masih lemahnya kontrol yang tegas dari pemerintah atas tindakan-tindakan pelayanan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pada Dinas Pariwisata terdapat pelayanan langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pelayanan langsung tersebut berupa layanan penerbitan surat izin penyelenggaraan acara dan pelayanan pemberian informasi kepada para wisatawan baik di bandara, TIC Pantai Pasir Padi maupun di galeri Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Sedangkan pelayanan tidak langsung dilakukan melalui website dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang info-info kepariwisataan

yang ada di Kota Pangkalpinang, sehingga para wisatawan tertarik untuk datang ke Kota Pangkalpinang.

Adapun isu permasalahan strategis yang ada di Dinas Pariwisata Kota pangkalpinang, meliputi :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.

1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi dinas; RENSTRA berisi uraian singkat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program daerah; Renja yang berisi uraian kegiatan dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan program pada tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja keberhasilan pencapaiannya serta Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN.RB/ BPKP/ Inspektorat.

BAB IV PENUTUP

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan SAKIP Kota Pangkalpinang dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu kriteria dalam mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan Revisi Renstra dengan menggandeng KEMENPANRB yang mana menghasilkan beberapa perubahan terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA.

Adapun Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)

Berdasarkan visi tersebut, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mengampu misi 1. Adapun misi RPJMD yang terkait sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah

Indikator Tujuan : PDRB perkapita

Sasaran : Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah

Indikator Sasaran : PAD sektor pariwisata

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Revisi Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator PAD sektor pariwisata.

2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang digunakan Dinas Pariwisata dalam rangka pencapaian sasaran adalah Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Desa Wisata di beberapa kecamatan
2. Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata

2.4. Rencana Kinerja

2.4.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2021, yakni mencakup :

1. melakukan penyusunan Revisi Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
2. menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan;
3. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai ukuran keberhasilan instansi agar lebih spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan informasi yang jelas akan keberhasilan dalam mencapai sasaran;
4. menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja;
5. menyusun pedoman evaluasi/reviu kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam KepMenPAN Nomor 135 Tahun 2004 serta melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang;
6. meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Target dan Realisasi Tujuan Sasaran Tahun 2019 s.d. 2020
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun				Akhir Renstra 2020
					2019		2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatkan potensi pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,64	2,1	2,13 (Rp. 19.132.510.820)	2,1	9,86 (Rp. 14.036.203.600)	9,86
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Tingkat kunjungan wisatawan	%	6,69	10	38,26	N/A	N/A	38,26
		Jumlah kunjungan wisatawan	orang	228.473	231.000	315.888	347.476	133.648	133.648

Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 s.d. 2023
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun			Akhir Renstra 2023
					2021	2022	2023	
Meningkatkan potensi pariwisata		PAD sektor pariwisata	Rp	14.036.203.600	15.439.823.960	16.983.806.356	18.682.186.991	18.682.186.991
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	133.648	147.012	161.713	177.884	177.884
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Uraian indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 (*berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023*) adalah sebagai berikut :

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	147.012 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : tingkat kunjungan wisatawan • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,5 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Rata-rata lama kunjungan wisatawan dalam satu tahun • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

2.4.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang berupa pernyataan komitmen oleh pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, hal ini sangat penting karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	147.012
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1,5

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu
- Biaya : Rp 2.810.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Indikator : Jumlah dokumen RKA-SKPD
- Biaya : Rp 1.470.000,-

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB
- Biaya : Rp 1.340.000,-

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan
- Biaya : Rp 2.921.770.591,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Tersedianya gaji ASN
- Biaya : Rp 2.921.770.591,-

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
- Biaya : Rp 1.490.000,-

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase terpenuhinya Administrasi umum
- Biaya : Rp 39.947.700,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
 - Biaya : Rp 2.990.500,-
- 1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Indikator : Jumlah bahan logistik kantor yang yang tersedia
 - Biaya : 13.435.000,-
- 1.3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Indikator : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
 - Biaya : Rp 8.285.000,-
- 1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
 - Biaya : Rp 15.237.200,-
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator : Presentase Terepenuhinya Penyediaan Jasa
 - Biaya : Rp 359.811.410,-
- Dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Indikator : Jumlah jasa yang tersedia
 - Biaya : Rp 67.809.600,-
- 1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
 - Biaya : Rp 16.978.000,-
- 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani
 - Biaya : Rp 275.023.810,-
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator : Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

- Biaya : Rp 92.366.364,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
- Biaya : Rp 49.216.364,-

1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Indikator : Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara
- Biaya : Rp 43.150.000,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 87.850.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 87.850.000,-

2.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata
- Biaya : Rp 1.124.295.806,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.2.1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

- Indikator : Jumlah peserta yang mengikuti

pelatihan/sosialisasi/ lomba

- Biaya : Rp 616.127.140,-

1.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah entitas pengelolaan destinasi
- Biaya : Rp 508.168.666,-

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 706.452.763,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

3.1.1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah jenis media promosi
- Biaya : Rp 339.040.000,-

3.1.2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri
- Biaya : Rp 278.847.763,-

3.1.3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 88.565.000,-

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- Biaya : Rp 274.905.066,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

4.1.1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan
- Biaya : Rp 123.225.430,-

4.1.2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- Indikator : Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat
- Biaya : Rp 123.225.430,-

4.1.3. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 28.454.206,-

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 5.610.209.700,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan di tahun 2020 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 3.206.120.340,59 (Tiga milyar dua ratus enam juta seratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah lima puluh sembilan sen).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018-2023 maupun Rencana Kinerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2021 dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA 2018- 2023.

3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pariwisata Kota

Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta sasaran RPJMD 2018-2023.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	>100 %	Baik Sekali	
2	75 % s.d. 100 %	Baik	
3	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4	< 55 %	Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang hanya ada 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan target indikator 147.012 orang wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target indikator 1,5 hari. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada analisis capaian kinerja selanjutnya.

Hingga akhir tahun 2021, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran, dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Sasaran :

Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata

Pencapaian sasaran meliputi 2 (dua) indikator dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel
Análisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
			target	realisasi	capaian
1	Jumlah kunjungan wisatawan	133.348 orang	147.012	195.230	132,8%
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,5 hari	1,5	0,7	46,67%

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Untuk jumlah kunjungan wisatawan baik tingkat kota, propinsi maupun nasional rata-rata mengalami penurunan khususnya untuk kunjungan wisatawan mancanegara, sedangkan untuk kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan.

Sasaran jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang tahun 2021 dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari target sebesar 147.012 orang dan teralisasi 195.230 orang atau 132,8%. Sedangkan pada tahun 2020 target jumlah kunjungan wisatawan 347.476 orang terealisasi 133.348 orang. Terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar 46,41%. Hal ini dikarenakan mulai bangkitnya perekonomian masyarakat karena terjadinya pandemi covid-19 yang berpengaruh besar terhadap dunia pariwisata. Industri pariwisata pun sudah bisa mulai beraktifitas kembali meskipun masih adanya pembatasan-pembatasan dengan penerapan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini.

Adapun kunjungan sejumlah 195.230 orang terdiri dari kunjungan wisatawan nusantara sejumlah 195.067 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 163 orang. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan

kunjungan wisatawan nusantara sebesar 31,63% dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2020 sejumlah 133.365 orang. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan 45,63% dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2020 sejumlah 283 orang.

Kunjungan wisatawan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sejumlah 223.515 orang yang terdiri dari 445 orang wisatawan mancanegara dan 223.070 orang wisatawan nusantara. Pada Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 82,03% dibandingkan kunjungan pada tahun 2020 sejumlah 2.476 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan sebesar 0,72% dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2020 sejumlah 221.475 orang.

Untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 secara nasional mengalami penurunan sebesar 61,57% dibandingkan kunjungan pada tahun 2020, dimana jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sejumlah 4.052.923 orang dan pada tahun 2021 sejumlah 1.557.530 orang.

Penurunan jumlah kunjungan ini di sebabkan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan pembatasan penerbangan yang diatur pemerintah pusat ke daerah secara berkala.
- b. Pengetatan kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada akhir tahun dimana wisatawan yang ingin berkunjung harus melampirkan tes rapid antigen atau tes PCR.
- c. Pelarangan sementara warga negara asing masuk wilayah negara Republik Indonesia ditahun 2021 oleh pemerintah pusat.
- d. DKI Jakarta sebagai hub dari dan ke seluruh Indonesia, selain itu salah satu pasar wisatawan domestik ke Bangka Belitung masih dalam zona merah Covid-19 dan secara berkala sampai akhir tahun 2021 masih diberlakukannya PSBB di wilayah tersebut.
- e. Jumlah wisatawan domestik menurun dikarenakan banyak perusahaan yang berhenti operasi bahkan bangkrut karena melemahnya daya beli sehingga pendapatan masyarakat turun, meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan dan meningkatnya pengangguran.

- f. Adanya pembatasan kegiatan serta diperketatnya protokol kesehatan kegiatan masyarakat termasuk di tempat wisata, hotel dan restoran.
- g. Adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran kegiatan baik APBD maupun APBN sehingga tidak dilaksanakannya/ditundanya kegiatan di hotel seperti pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain.

Untuk itu perlu dilakukannya terobosan yang dapat membangkitkan kembali industri pariwisata sehingga indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan dapat ditingkatkan.

2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Adapun indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 adalah 0,7 hari atau 46,67% dari target yang ditetapkan yaitu 1,5 hari. Sehingga rata-rata lamanya wisatawan tinggal di Pangkalpinang dalam 1 tahun dalam waktu sekitar 1 hari. Hal ini disebabkan karena Kota Pangkalpinang terkadang hanya sebagai tempat transit para wisatawan yang berkunjung ke kabupaten lain di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang, juga karena terbatasnya objek wisata alam di Kota Pangkalpinang. Akan tetapi para wisatawan tersebut tetap melakukan aktifitas transaksi jual beli seperti makan minum dan belanja oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerah asal di Kota Pangkalpinang.

Adapun untuk pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2021 mencapai Rp. 17.449.027.111,00 atau 10,33% dari total PAD sebesar Rp. 168.863.503.538,32. Sedangkan capaian pada tahun 2020 sebesar Rp. 14.104.384.680,00 atau 10,01% dari total PAD sebesar Rp. 140.964.396.672,73. Terjadi kenaikan realisasi PAD dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 23,71%.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 melaksanakan program dan kegiatan, sebagaimana berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Penganggaran yang mendukung terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata”

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Output program/ kegiatan yang dihasilkan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.470.000	1.470.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.340.000	1.340.000	Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.920.280.591	2.826.836.176	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.490.000	1.490.000	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.500	2.990.500	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.435.000	13.430.500	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.285.000	8.285.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.237.200	15.237.200	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.809.600	66.891.847	Jumlah jasa yang tersedia
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.978.000	16.910.500	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.023.810	269.362.000	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.216.364	48.886.245	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.150.000	43.150.000	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	87.850.000	87.606.000	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	616.127.140	585.222.140	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	508.168.666	489.215.1000	Jumlah entitas pengelolaan destinasi
3	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	339.040.000	326.890.000	Jumlah jenis media promosi
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	278.847.763	278.488.776	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri

			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	88.565.000	88.165.000	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	123.225.430	118.575.430	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	123.225.430	121.225.430	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	28.454.206	28.454.206	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata

3.4. Analisis Keuangan

Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2021 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan
2. Realisasi Anggaran Belanja Operasional
3. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Adapun rincian masing-masing diuraikan di bawah ini :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perda Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2019) tentang Retribusi Jasa usaha. Jumlah realisasi pendapatan asli daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 64 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kemudian untuk Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah pada tahun 2021 tidak ada realisasi dengan target Rp. 19.200.000,00, dikarenakan masih dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi covid-19.

Pada tahun 2020 realisasi atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 29.000.000,00, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan dikarenakan masih dalam masa transisi terjadinya pandemi covid-19 dimana masyarakat harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh adanya kerumunan, sehingga tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan pendapatan asli daerah pada izin pelaksanaan acara.

2. Realisasi Anggaran Belanja Operasional

Realisasi anggaran belanja operasional tahun 2021 yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebesar Rp 5.368.992.050,00 atau 97,27% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 5.519.929.700,00.

Sedangkan realisasi belanja operasional tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebesar Rp 4.415.944.760,00 atau 94,28 % dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 4.683.825.289,63.

3. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebesar Rp 71.130.000,00 atau 78,79% dari dana yang tersedia dalam sebesar Rp 90.280.000,00.

Sedangkan realisasi belanja modal pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebesar Rp. 1.449.556.145,59 atau 59,12% dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 2.451.746.900,00.

Terjadi penurunan anggaran belanja modal yang sangat signifikan dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pembangunan di Pantai Pasir Padi, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kepariwisata untuk Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

**Perbandingan Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Tahun / Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja	7.135.572.189,63	5.865.500.905,59	82,20	5.610.209.700	5.440.122.050	96,97
Belanja Operasio nal	4.683.825.289,63	4.415.944.760,00	94,28	5.519.929.700,00	5.368.992.050,00	97,27
Belanja Modal	2.451.746.900,00	1.449.556.145,59	59,12	90.280.000,00	71.130.000,00	78,79

Dari tabel di atas dapat disimpulkan anggaran tahun 2020 lebih besar dari anggaran tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang hanya mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kepariwisataaan. Dan untuk realisasinya secara rata-rata persentase pada tahun 2021 lebih dari besar dari tahun 2020.

3.5. Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada periode Desember 2021 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah 76 orang terdiri atas 32 ASN dan 44 PHL.

Untuk jabatan Eselon II pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang di pegang oleh Pelaksana Tugas (Plt), kemudian masih adanya beberapa jabatan struktural yang belum terisi, sehingga kurangnya personil dan memperlambat pencapaian sasaran. Dan masih banyaknya pegawai yang belum memahami tupoksi sehingga belum maksimal dan tidak terarah dalam pelaksanaan penugasan kedinasan.

3.6. Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2021 Sebagai Bahan Penentu Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2022

Hasil evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Beranjak dari kenyataan itu, sudah selayaknya ada perbaikan yang berkesinambungan atas pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Hal tersebut dapat dimulai dari bidang-bidang secara teknis dalam hal pemenuhan permintaan data, dengan menggunakan strategi yang tepat dalam mendapatkan data sebagai penunjang dalam penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata. Adapun kendala teknis lainnya dalam pencapaian pelaporan yang baik dan benar adalah menyangkut daya dukung renstra/program kegiatan dalam menyokong pencapaian RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang secara bertahap harus disempurnakan.

Hasil evaluasi LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2020, digambarkan sebagai berikut:

1. Agar mempublikasikan dokumen renstra, perjanjian dan IKU:
2. Melakukan monitoring terhadap pencapaian rencana aksi secara berkala:
3. Menindaklanjuti hasil dari pengukuran kinerja atas rencana aksi secara menyeluruh:
4. Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap laporan kinerja;
5. Memantau, melaksanakan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil terhadap rencana aksi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang sudah diuraikan dapat disimpulkan untuk pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sudah cukup. Untuk itu bangkitnya dunia kepariwisataan menempati posisi strategis dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, dimana industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terdampak pandemi ini, bukan hanya pada tingkat regional, tetapi juga nasional dan internasional. Mengingat posisi strategis tersebut diharapkan pembangunan pariwisata dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan kedepan, Kota Pangkalpinang memerlukan pengelolaan secara terpadu baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta masyarakat.

4.2. Permasalahan

Disadari bahwa dengan adanya pandemi covid-19, pembangunan kepariwisataan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan antara lain :

1. Masih kurangnya peran serta masyarakat/ stakeholder dan kelembagaan kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengembangan kepariwisataan.
3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi.
4. Belum terpadunya informasi pariwisata.
5. Kurangnya event-event kepariwisataan.

4.3. SOLUSI

Dari kondisi tersebut dapat dilakukan langkah-langkah agar dapat mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan, antara lain :

1. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, investor lokal, nasional dan asing dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

2. Menyusun rencana detail pengembangan masing-masing objek wisata dalam bentuk Rencana Induk pengembangan Destinasi dan pembentukan serta pengembangan kawasan pariwisata.
3. Memantapkan rencana strategis kepariwisataan.
4. Pengembangan produk wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus untuk menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
5. Menjalin kerjasama dengan daerah dan kabupaten lain sehingga menjadi satu kesatuan destinasi wisata dan kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan.
6. Pelaksanaan event attraction kepariwisataan skala lokal, regional dan nasional.
7. Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur di destinasi wisata.
8. Pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan promosi kepariwisataan.
9. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk badan pengelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang diemban antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Secara keseluruhan dapat diinformasikan, bahwa hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2021 sudah memenuhi seluruh sasaran strategis yang ditargetkan pada tahun 2021.